
ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PERKAPITA, PENDIDIKAN, DAN KESEHATAN TERHADAP KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI INDONESIA TAHUN 2010-2019

Nineng Noer Laila¹, Sri Indriyani S. Da², Syarvani Canon³, Irawati Abdul⁴

^{1,2,3,4}Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo

Email: ninenglaila99@gmail.com

Abstract: This current research aims to determine the level of inequality of income distribution in seven islands in Indonesia (Sumatra, Java-Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, and Papua). Also, it aims to analyze the impact of Per capita Expenditure, Education (Average years of schooling of population aged greater than or equal to 15 years), and health (Population who have health complaints during the past month) on Inequality of Income distribution in Indonesia in 2010-2019. The data used in this research are secondary data from the Statistics Indonesia. The research employs initial method, namely Williamson Index analysis method, followed by panel data multiple regression analysis technique through Fixed Effect Model (FEM) approach. The results of Williamson Index show that the average level of inequality in seven islands in Indonesia is 0,20 on the Williamson Index scale, which means that the seven islands in Indonesia are in low inequality. Meanwhile, Per capita Expenditure has a negative and significant impact on the inequality of income distribution in Indonesia, Education (Average years of schooling for the population aged greater than or equal to 15 years) has a negative and insignificant impact on the inequality of income distribution in Indonesia, and Health (People who have health complaints during the past month) has a positive and significant impact on the inequality of income distribution in Indonesia. In conclusion, if the Williamson Index number indicates 1 then inequality is high, while this research signifies the Williamson Index with an average of 0.20, meaning that inequality in the seven islands in Indonesia is low.

Keywords: Per Capita expenditure; education; health; inequality.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di tujuh Pulau di Indonesia (Pulau Sumatera, Pulau Jawa-Bali, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, Pulau Papua) dan menganalisis pengaruh dari Pengeluaran Perkapita, Pendidikan (Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 Tahun), dan Kesehatan (Penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir) terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia Tahun 2010-2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode awal yaitu metode analisis Indeks Williamson kemudian menggunakan Teknik analisis regresi berganda data panel melalui pendekatan Fixed Effect Model (FEM). Hasil Indeks Williamson menunjukkan bahwa rata-rata tingkat ketimpangan yang terjadi di tujuh pulau di Indonesia sebesar 0,20 skala Indeks Williamson, yang berarti bahwa ke tujuh pulau di Indonesia berada di ketimpangan rendah. Dengan Pengeluaran Perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia, Pendidikan (Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 Tahun) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia, dan Kesehatan (Penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Disimpulkan bahwa jika angka Indeks Williamson menunjukkan angka 1 maka ketimpangan berada dalam posisi tinggi, pada hasil analisis Indeks Williamson menunjukkan rata-rata sebesar 0,20 yang berarti ketimpangan antar tujuh pulau di Indonesia menunjukkan ketimpangan yang rendah.

Kata Kunci: Pengeluaran Perkapita; Pendidikan; Kesehatan; Ketimpangan

PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang, pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan bagi suatu negara, sekalipun negara tersebut sudah dalam keadaan makmur. Pemerintah Indonesia mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Adil dan makmur merupakan landasan hidup dalam mewujudkan ketahanan untuk mencapai masyarakat sejahtera melalui pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian proses perubahan dalam menuju perbaikan yang dilakukan secara sadar serta terencana untuk bisa meningkatkan taraf hidup dari masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut turut melibatkan segala aspek sosial lingkungan serta didukung mekanisme politik yang bertanggung jawab sehingga setiap kebijakan ekonomi dapat diuraikan kembali secara transparan, adil dan memenuhi kaidah-kaidah perencanaan.

Dalam pembangunan ekonomi ada dua masalah besar yang umumnya dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia yakni kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang berada di bawah garis kemiskinan (Tambunan, 2001) dalam (Riyanto dan Firmansyah, 2020), (Damanik *et al.*, 2018).

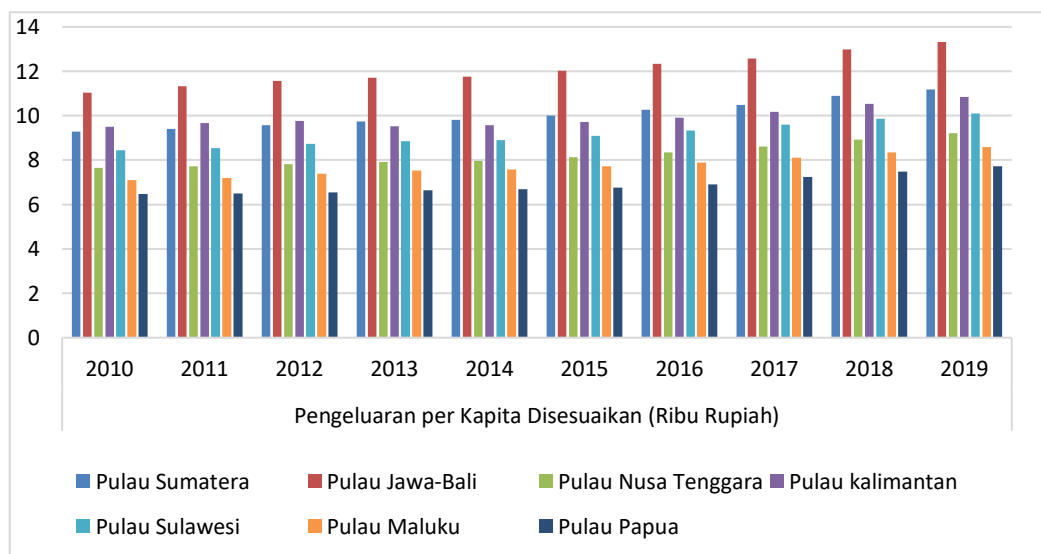
Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan adalah sebuah realita yang ada di tengah-tengah masyarakat dunia baik di negara yang maju maupun negara berkembang yang juga merupakan isu penting untuk ditinjau dan perlu adanya berbagai upaya dari pemerintah dalam mengambil kebijakan guna meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat, serta peningkatan taraf hidup masyarakat melalui berbagai macam usaha dalam rangka peningkatan distribusi pendapatan dari berbagai macam aspek yang ada.

Menurut Todaro distribusi pendapatan merupakan pembagian penghasilan di dalam masyarakat. Dalam proses produksi, para pemilik faktor produksi akan menerima imbalan seharga faktor produksi yang disumbangkan dalam proses produksi. Proses distribusi pendapatan ini akan terjadi siklus (perputaran) konsumen yang harus membayar harga barang. Akan tetapi pada saat lain akan menjadi penyedia faktor modal, tenaga kerja, sumber daya alam, atau faktor keahlian sehingga, pada saat tertentu akan menerima bagian pendapatan dan pada saat lain akan membayar harga barang (Situmeang, 2018).

Dalam proses produksi, masing-masing penyedia faktor produksi akan menerima imbalan jasa sebagai pemilik faktor sumber alam berupa tanah akan menerima tanah, pemilik faktor tenaga kerja akan menerima upah kerja, pemilik modal akan menerima bunga modal, pengusaha akan menerima laba usaha. Semakin besar pemerataan maka hal itu dapat menjadi intensif yang baik bagi negara yang sedang berkembang untuk membangun perekonomian.

Berbicara tentang ketimpangan distribusi pendapatan suatu daerah tidak lepas dari adanya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya ketidakmerataan distribusi pendapatan di daerah itu sendiri antara lain, pengeluaran perkapita, pendidikan dan juga Kesehatan (Dondo *et al.*, 2019)

Untuk melihat status pembangunan manusia di suatu wilayah diperlukan salah satu komponen yang dapat memberikan gambaran yakni pengeluaran perkapita. Pengeluaran perkapita digunakan untuk mengukur standar hidup manusia. Ini juga di pengaruhi oleh pengetahuan serta peluang yang ada untuk merealisasikan pengetahuan dalam berbagai kegiatan produktif sehingga menghasilkan output baik barang maupun jasa sebagai pendapatan (Muda *et al.*, 2019). Data di bawah ini menunjukkan pengeluaran perkapita yang dirilis oleh BPS pada tahun 2021.

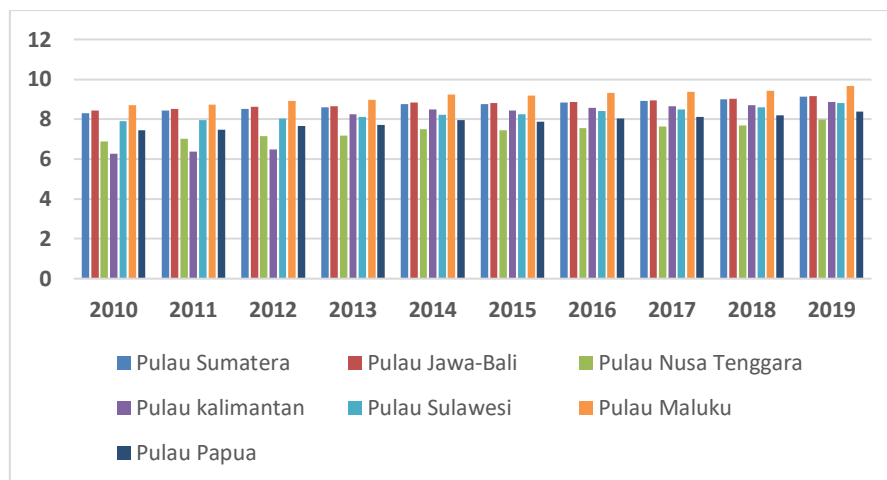


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 1.
Pengeluaran Perkapita (Ribuan Rupiah)

Berdasarkan gambar diatas menurut Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa pengeluaran perkapita di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan, dimana pengeluaran perkapita tertinggi pada tahun 2010-2019 didominasi oleh Pulau Jawa-Bali, dan pengeluaran perkapita terendah tahun 2010-2019 didominasi oleh Pulau Papua.

Menurut Kuncoro (2003), ketimpangan bukan hanya semata-mata persoalan kekayaan, melainkan juga kesempatan terhadap akses pendidikan dan Kesehatan. Oleh karena itu pendidikan juga menjadi penyebab dari kesenjangan yang dikarenakan pembiayaan subsidi untuk pendidikan di Indonesia yang di ambil dari 20% anggaran APBN dirasa belum tepat sasaran, hal tersebut terjadi karena system pendidikan hingga saat ini masih mengalami masalah yang serius dalam hal kualitas dan akses sehingga tingkat pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya dalam kondisi yang baik (Nadya dan Syafri, 2019).



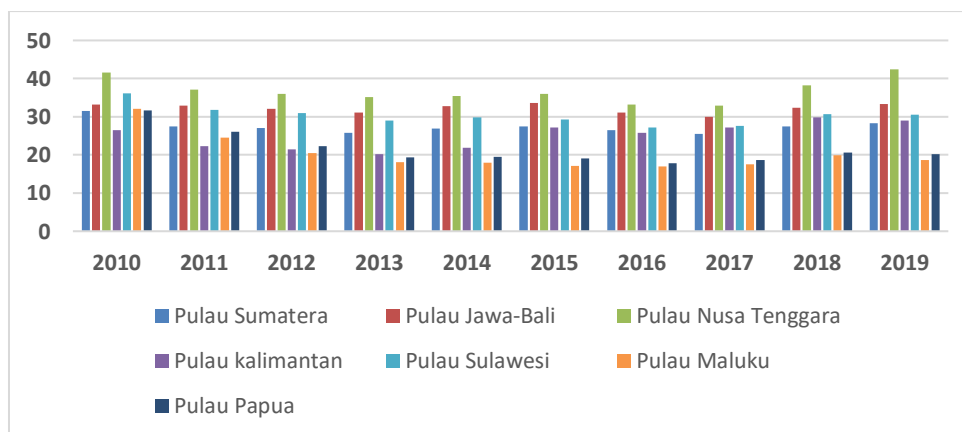
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022.

Gambar 2.
Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur ≥ 15 Tahun

Berdasarkan gambar diatas menurut Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa kondisi rata-rata lamaa sekolah di Indonesia dari tahun 2010-2019 mengalami peningkatan, dimana rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun yang tertinggi berasal dari pulau Maluku sedangkan dimana rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun yang terendah dari tahun 2010-2012 berasal dari Pulau Kalimantan, dan di tahun 2013-2019 berasal dari Pulau Nusa Tenggara.

Selain pendidikan yang berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, Kesehatan juga dapat berpengaruh dalam ketimpangan distribusi pendapatan. Menurut Lincoln (1999), intervensi untuk dapat memperbaiki kesehatan dari pemerintah juga merupakan suatu alat kebijakan penting dapat mengurangi kemiskinan. Salah satu faktor yang mendasari kebijakan tersebut ialah perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas golongan miskin.

Kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan menaikkan output energi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kesehatan di Indonesia mengalami fluktuasi. Perkembangan penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir di Indonesia selama periode tahun 2010-2019 dilihat pada tabel 1.3 sebagai berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022.

Gambar 3.
Presentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir

Berdasarkan gambar diatas menurut Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa kondisi penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir di Indonesia selama periode tahun 2010-2019 tidak stabil atau berfluktuasi. Rata-rata

penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir di Indonesia masih di bawah angka 50 persen. Penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan di Indonesia yang tertinggi di dominasi oleh pulau Nusa Tenggara sedangkan penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan terendah tahun 2010-2011 di dominasi oleh Pulau Kalimantan dan di tahun 2012-2019 di dominasi oleh Pulau Maluku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa time series pada periode 2010-2019 di Indonesia yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi literatur. Penelitian ini menggunakan metode awal yaitu metode analisis Indeks Williamson kemudian menggunakan teknik analisis regresi data panel berganda melalui pendekatan Fixed Effect Model (FEM).

HASIL PENELITIAN

Uji Model Regresi

Tabel 1. Uji Model Regresi

PENGUJIAN	PROBABILITAS	KEPUTUSAN
Uji LM	Cross-section Breusch-Pagan = (0.0002) ***	REM Lebih baik dari CEM
Uji Chow	Cross-section F (0.0000) ***	FEM Lebih baik dari REM
Uji Hausman	Cross-section random (0.0000) ***	FEM lebih baik dari REM

Catatan: α (Signifikan) = ***)1%, **)5%, *)10% dan NS) Not Signifikan
Sumber: Hasil Pengolahan, 2022 (Terlampir)

Hasil di atas menunjukkan bahwa penampang Breusch-Pagan lebih kecil dari 0.01 yaitu 0.0000, sehingga hipotesis H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti **Random Effects Model (REM) lebih baik digunakan**. Hasil uji chow, *common effect model* dan *fixed effect model* diatas, diperoleh nilai probabilitas (p-value) *cross section* F sebesar $0.0000 \leq 0.01$ maka hipotesis H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti model **Fixed Effect Model (FEM)** merupakan model yang lebih tepat untuk digunakan. Hasil uji hausman, *random effect model* dan *fixed effect model* diatas, diperoleh nilai probabilitas *Cross section random* sebesar $0.0000 \leq 0.01$ maka hipotesis H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti model **Fixed Effect Model (FEM)** merupakan model yang lebih tepat untuk digunakan.

Analisis Regresi

Tabel 2. Analisis Model Regresi (Fixed Effect)

Dependent Variable: IW?
Method: Pooled EGLS (Cross-section SUR)
Total pool (balanced) observations: 70

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.115265	0.089499	1.287891	0.2027 ^{NS}
PP?	-0.033062	0.006069	-5.447710	0.0000 ^{***}
RLS?	-0.005110	0.007051	-0.724637	0.4715 ^{NS}
PYMKK?	0.015621	0.001475	10.59272	0.0000 ^{***}
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Weighted Statistics				
R-squared	0.974313	Mean dependent var		3.867053
Adjusted R-squared	0.970460	S.D. dependent var		6.431386
S.E. of regression	0.992843	Sum squared resid		59.14425
F-statistic	252.8720	Durbin-Watson stat		2.038425
Prob(F-statistic)	0.000000 ^{***}			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.656385	Mean dependent var		0.204660
Sum squared resid	0.462209	Durbin-Watson stat		1.660250

Catatan: α (Signifikan) = ***)1%, **)5%, *)10% dan NS) Not Signifikan
IW : Indeks Wiliamson
PP : Pendapatan Perkapita
RLS : Pendidikan (Rerata Lamas Sekolah)
PYMKK : Kesehatan

Sumber: Hasil Pengolahan, 2022 (Terlampir)

Maka Persamaan Terbentuk dari tabel 4.2 diatas sebagai berikut.
Interpretasi hasil dari tabel diatas menjelaskan bahwa:

- 1) C = Konstanta, merupakan variabel penyebut dari variabel dari Ketimpangan Pendapatan (IW) yang apabila tidak dipengaruhi oleh variabel dalam model penelitian akan bernilai sebesar 0.115265 Persen.
- 2) PP = Pengeluaran Perkapita, berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan memiliki koefisien sebesar -0.033062. Dari hasil estimasi tersebut dapat dijelaskan bahwa jika Pengeluaran perkapita meningkat sebesar 1 Ribu Rupiah/Jiwa, dapat menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar -0.033062 Persen.
- 3) RLS = Rerata Lama Sekolah, berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. koefisien sebesar -0.005110. Dari hasil estimasi tersebut dapat dijelaskan bahwa jika Rerata Lama Sekolah meningkat sebesar 1 tahun maka ketimpangan pendapatan menurun sebesar 0.005110 Persen.
- 4) PYMKK = Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan, berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. koefisien sebesar -0.015621. Dari hasil estimasi tersebut dapat dijelaskan bahwa jika Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan meningkat sebesar 1 persen maka ketimpangan pendapatan meningkat sebesar 0.015621 Persen.

Dalam model *fixed effect*, masing-masing individu mempunyai intersep yang berbeda-beda akan tetapi besarnya relatif sama dari tahun ke tahun. Dengan demikian, setiap pulau dalam penelitian ini memiliki karakteristik yaitu dasar ketimpangan pendapatan yang berbeda satu sama lain. Perbedaan ini dapat dilihat dari intersep masing-masing pulau seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Intersept Wilayah

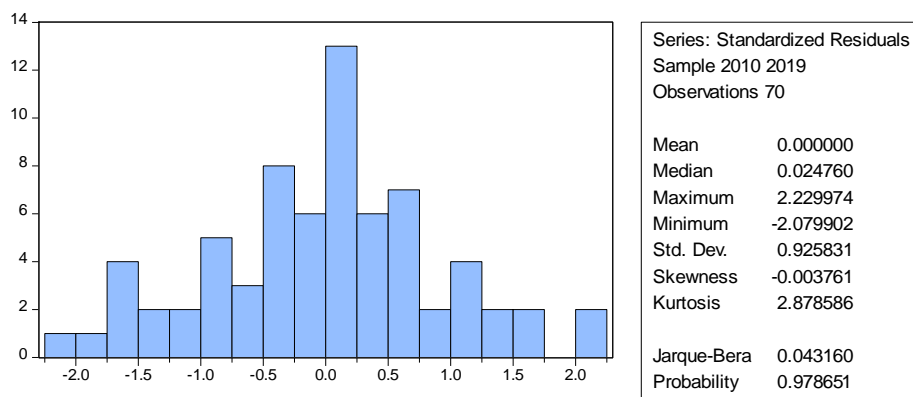
Fixed Effects (Cross)	Dibawah Rata-rata	Diatas Rata-rata
<u>_NUSA_TENGGARA--C</u>	-0.246029	
<u>_SULAWESI--C</u>	-0.096240	
<u>_SUMATERA--C</u>	-0.014606	
<u>_MALUKU--C</u>	-0.001153	
Total Dibawah Rata-Rata	-0.358028	
<u>_PAPUA--C</u>		0.006805
<u>_JAWA_BALI--C</u>		0.097847
<u>_KALIMANTAN--C</u>		0.253376
Total Diatas Rata-Rata		0.358028

Sumber: Hasil Pengolahan, 2022 (Terlampir)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dengan nilai konstanta terbesar adalah Pulau Nusa Tenggara dibawah rata-rata sebesar 0.246029. Dengan demikian apabila variabel lain (Pengeluaran perkapita, Rerata lama sekolah dan Keluhan Kesehatan) dianggap nol, maka ketimpangan pendapatan sebesar 0.246029 persen. Begitu juga dengan intersep untuk Pulau lain. Sementara untuk yang memberikan peningkatan pendapatan diatas rata-rata terbesar terletak di Pulau Kalimantan yakni sebesar 0.253376 persen. Nilai intersep tersebut yang membedakan ketimpangan pendapatan untuk analisa setiap Pulau. Intersep juga dapat menunjukkan ketimpangan awal masing-masing Pulau. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan akumulasi nilai intersept dibawah dan diatas rata-rata. Apabila nilainya nol maka tidak terjadi ketimpangan pendapatan atau dapat dikatakan pendapatan terdistribusi secara merata.

Uji Normalitas

Pengujian pertama dalam asumsi klasik adalah normalitas data, dimana syarat yang harus dipenuhi adalah data berdistribusi normal atau uji normalitas untuk analisis data, dengan melakukan uji normalitas residual menggunakan grafik histogram. Prasyarat yang harus dipenuhi adalah nilai probabilitas JB harus lebih kecil dari alpa ($\alpha = 1\%$, 5% dan 10%), sehingga datanya dapat dikatakan normal.



Sumber: Hasil Pengolahan, 2022 (Terlampir)

Gambar 4. Normalitas data

Diketahui nilai jarque-bera sebesar 0.043160 dengan nilai probabilitas sebesar $0.978651 > \alpha$ sama dengan 10% (0,1). Dengan kata lain, bahwa data telah terdistribusi normal disebabkan oleh nilai prob jarque-bera lebih dari nilai alpha ($\alpha=10\%$).

Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas diperuntukan mengetahui apakah dalam model regresi terdapat hubungan linear antara variabel bebas. Penelitian ini menggunakan matriks korelasi antar variabel bebas untuk menemukan beberapa hubungan linier. Menurut Riyanto, E (2020) apabila nilai korelasi dalam matriks korelasi antar variabel independen lebih besar dari 0,80, model terdapat hubungan korelasi linier antara variabel.

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Independen	PP	RLS	PYMKK
PP	1	0.38637	0.31172
RLS	0.38637	1	-0.29659
PYMKK	0.31172	-0.29659	1

Keterangan:

IW : Indeks Wiliamson

PP : Pendapatan Perkapita

RLS : Pendidikan (Rerata Lamas Sekolah)

PYMKK : Kesehatan

Sumber: Hasil Pengolahan, 2022 (Terlampir)

Dari hasil pada tabel di atas menunjukkan bahwa antara variabel PP dengan RLS tidak terjadi multikolinieritas (nilai 0.38637 kurang dari 0,80), dan PP dengan PYMKK juga tidak terjadi multikolinieritas (nilai 0.31172 kurang dari 0,80) dan untunk RLS dengan PYMKK tidak terjadi multikolinieritas (nilai -0.29659 kurang dari 0,80). Sehingga keputusan yang dapat diambil adalah estimasi keseluruhan tidak mengandung gejala multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah pengujian yang bertujuan untuk memeriksa apakah model persamaan regresi terdapat ketidaksamaan residual periode pengamatan. Jika residual dari periode pengamatan tetap/konstan, homoskedastisitas dan jika berbeda, perubahan nilainya disebut heteroskedastisitas.

Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas, maka digunakanlah metode Glejser yakni dengan membandingkan hasil F-statistik dan F-tabel yang diperoleh melalui meregres residualnya. Berikut hasil pengujian Heteroskedastisitas dalam penelitian ini:

Tabel 5. Uji Heterokedastisitas

Dependent Variable: RESABS

R-squared	0.215914	Mean dependent var	0.050604
Adjusted R-squared	0.180274	S.D. dependent var	0.064038
S.E. of regression	0.057979	Akaike info criterion	-2.802027
Sum squared resid	0.221863	Schwarz criterion	-2.673542
Log likelihood	102.0709	Hannan-Quinn criter.	-2.750991
F-statistic	6.058149	Durbin-Watson stat	0.707752
Prob(F-statistic)	0.001046***		

Catatan: a (Signifikan) = ***)1%, **)5%, *)10% dan (N.S) Not Signifikan

Sumber: Hasil Pengolahan, 2022 (Terlampir)

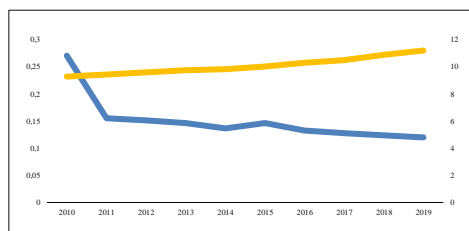
F-statistic yang diperoleh dari hasil di atas yakni 6.058149. Sedangkan untuk F-tabel dengan $df_1=k-1=4-1=3$ dan $df_2=70-4-1=65$ pada taraf signifikansi 0,05 adalah 0.67801. Jika dibandingkan maka F-tabel masih lebih besar dari F-statistic ($F_{stat} > F_{tabel}$) maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian ini. Hal ini juga dibuktikan dengan nilai Probabilitas lebih dari $\alpha = 1$ persen.

PEMBAHASAN

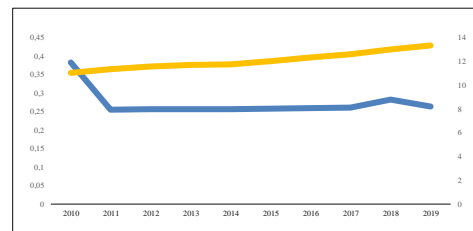
Pengaruh Pengeluaran Perkapita Terhadap Distribusi Pendapatan

Pengeluaran perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan yang terjadi di 7 Pulau Indonesia selama periode 2010-2019. Hal ini tentu mengindikasikan bahwa semakin besar pengeluaran perkapita maka akan signifikan menurunkan ketimpangan pendapatan yang terjadi.

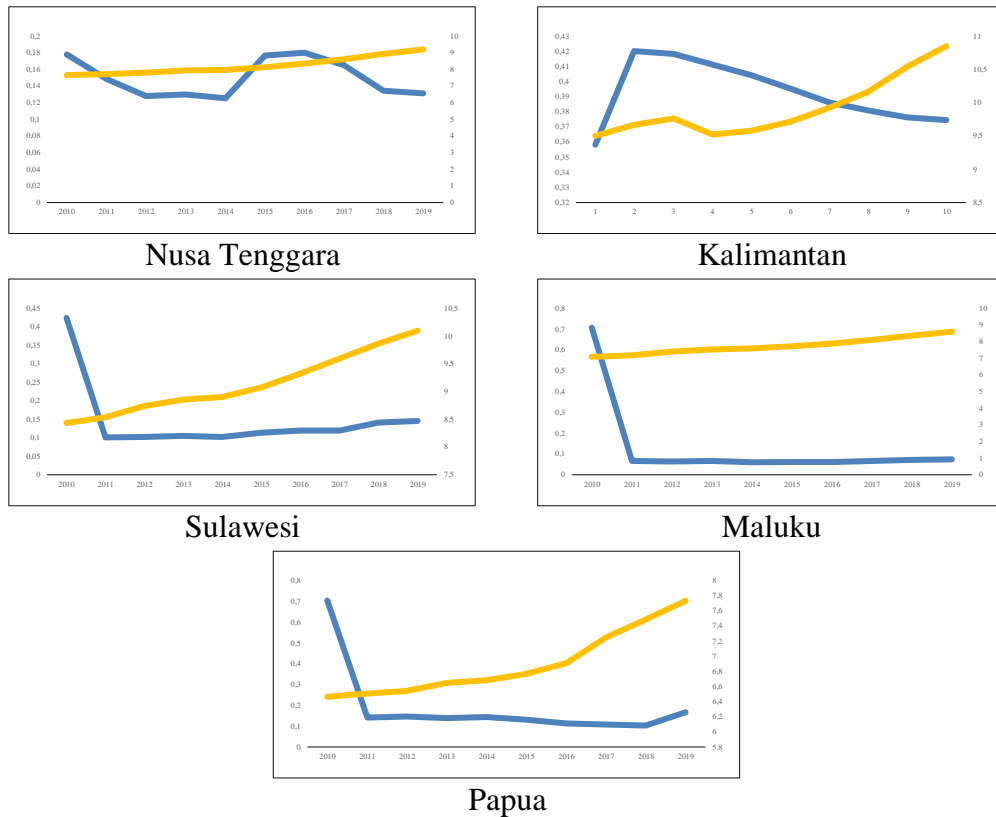
Yang membuat pengeluaran perkapita berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan adalah bahwa pengeluaran perkapita dapat menggambarkan kesejahteraan suatu masyarakat, dimana pengeluaran perkapita merupakan cerminan pendapatan rata-rata penduduk. Perbedaan pendapatan dari suatu sektor ekonomi juga dapat menjadi penyebab terjadinya perbedaan pendapatan tersebut. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini



Sumatera



Jawa & Bali



PP IW

Gambar 5. Hubungan Pengeluaran Perkapita Terhadap Ketimpangan Pendapatan 7 Pulau Di Indonesia

Jika dilihat terdapat 4 pulau yang menggambarkan pada tahap awal pembangunan akan terjadi ketimpangan pendapatan (Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan dan Jawa-Bali). Sementara untuk Sulawesi, Maluku dan Papua terdapat ketimpangan pendapatan yang stagnan dalam beberapa tahun terakhir.

Perkembangan suatu negara dalam batas-batas tertentu dapat menimbulkan kekhawatiran antar warganya. Kuznets (dalam Tambunan, 2015) menemukan hubungan terbalik berbentuk U antara peningkatan pendapatan dan tingkat pendapatan per kapita, menunjukkan bahwa distribusi pendapatan atau kesejahteraan memburuk di awal pembangunan. Namun, pada tahap selanjutnya dari pengeluaran per kapita, membuat ketimpangan pendapatan berkurang.

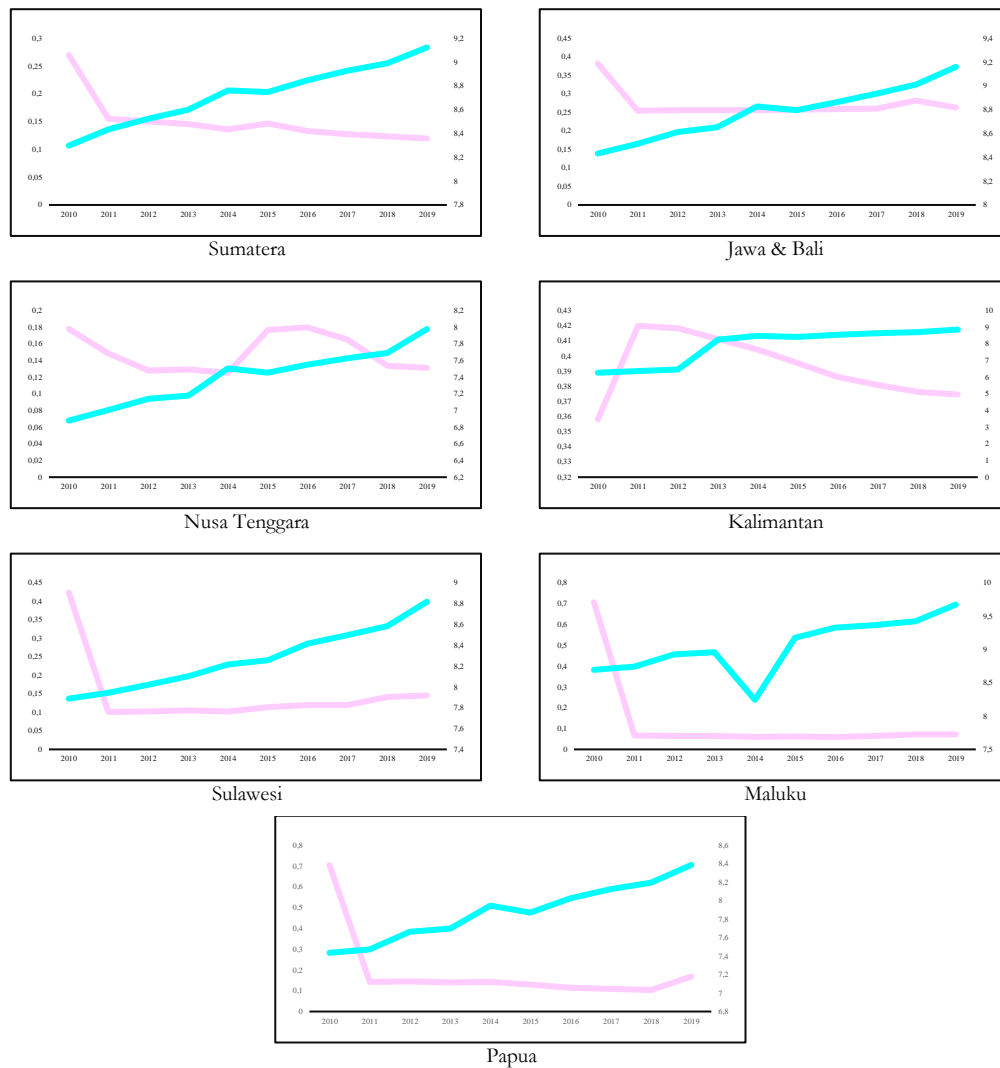
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Laut dkk., (2020), yang menjelaskan dampak signifikan antara pengeluaran per kapita dan ketimpangan pendapatan. Pengeluaran per kapita yang diperoleh dari pendapatan rata-rata penduduk, dimungkinkan karena ada beberapa masyarakat tertentu dengan pendapatan tinggi di suatu daerah sehingga dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan.

Pengaruh Pendidikan Terhadap Distribusi Pendapatan

Rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di 7 pulau besar Indonesia. Bahwa terjadi anomali ketika rata-rata lama sekolah meningkat tidak serta merta mampu menurunkan ketimpangan pendapatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pengakuan dari penelitian yang dilakukan oleh (Sanz *et al.*, 2017) mereka mendapati bahwa rendahnya pendidikan akan mempersulit mengakuisisi pendapatan yang tinggi bagi seseorang. Dengan demikian, alasan mengapa meningkatnya lamanya seseorang bersekolah dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan untuk wilayah bagian di Indonesia.

Jika tingkat pendidikan di suatu wilayah mengalami kesenjangan dalam hal pengetahuan, kelompok dengan tingkat pendidikan terendah tidak mungkin memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Akibatnya, tingkat pendapatan kelompok ini akan meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan di daerah itu. Sebaliknya, kelompok yang berpendidikan tinggi dapat memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Hal ini juga dapat menyebabkan peningkatan ketimpangan pendapatan. Misalnya rata-rata lama sekolah di Pulau Sumatera, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.



IW

RLS

Gambar 6. Hubungan Rata-rata Lama Sekolah Terhadap Ketimpangan Pendapatan 7 Pulau Di Indonesia

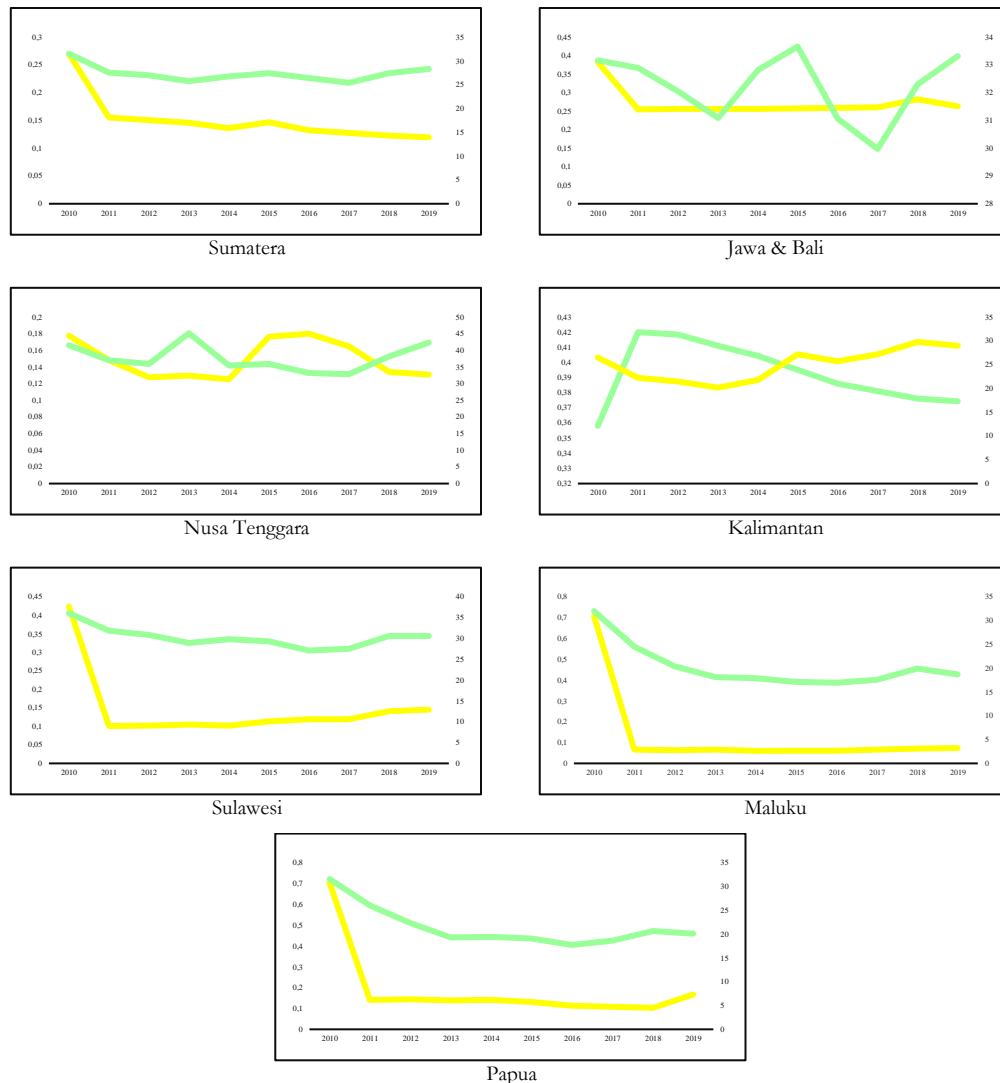
Dimana, ketika rerata lama sekolah meningkat maka ketimpangan pendapatan relatif stabil dan tidak adanya pergolakan naik atau bahkan menurun. Sementara, di Pulau Kalimantan bahwa tingkat pendidikan dapat menjadikan poin penting sebagai indikator penurunan ketimpangan pendapatan.

Selanjutnya, penurunan ketimpangan pendapat yang diakibatkan oleh peningkatan lamanya seseorang bersekolah belum dapat menjelaskan secara nyata. Karena pendidikan belum menjamin seseorang mendapatkan pendapatan lebih, dari jenjang pendidikannya yang tinggi. Pendidikan yang tinggi tanpa diimbangi dengan keahlian secara individual maka tergolong sia-sia. Sebab, dunia kerja mempunyai spesifikasi dan syarat yang harus dimiliki oleh para pekerja yang akan di rekrut kedalam perusahaannya.

Selain itu, masalah ini dapat diatasi dengan meningkatkan pelatihan dan sekolah kejuruan untuk meningkatkan pendapatan. Tidak hanya kuantitas tetapi juga kualitas sumber daya manusia. Karena dengan keterampilan ini masyarakat akan mendapatkan pendapatan yang lebih baik dan dengan demikian gap pendapatan dapat dipersempit dan tidak melebar.

Pengaruh Kesehatan Terhadap Distribusi Pendapatan

Namun, tidak ada jaminan bahwa semakin tinggi pendapat seseorang atau kepala rumah tangga, semakin rendah derajat kesehatannya. Hasanah, (2017) juga mendapati dalam penelitiannya terdapat hubungan searah antara kesehatan dan ketimpangan pendapatan (positif) artinya jika salah satunya (Kesehatan dan Ketimpangan pendapatan) meningkat maka akan di ikuti oleh peningkatan yang satunya lagi.



IW
RLS

Gambar 7. Hubungan Kesehatan Terhadap Ketimpangan Pendapatan 7 Pulau Di Indonesia

Kondisi di Gambar 4.4 menjelaskan bahwa indikator kesehatan yang diwakili oleh penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan. Semakin besar angka keluhan kesehatan para penduduk maka akan meningkatkan ketimpangan pendapatan dan terjadi 7 Pulau di Indonesia.

Banyaknya penderita gangguan kesehatan berdampak pada pendapatan yang diterima. Memang, membangun sumber daya manusia yang berkualitas membutuhkan perhatian yang sangat serius terhadap kesehatan masyarakat. Jika kesehatan nasional memburuk, ekonomi juga demikian. Menurunnya kegiatan ekonomi berdampak pada kemiskinan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.

Menurunnya kesehatan seseorang akan berimplikasi pada kegiatan sehari-harinya, sebab mereka tidak dapat melakukan aktivitas yang akan menambah pendapatannya. Maka sudah jelas bahwa kesehatan sangat mempengaruhi angka ketimpangan pendapatan. Kesehatan adalah keadaan sejahtera, jiwa, badan dan sosial yang mendukung setiap individu hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Kesehatan merupakan nilai dari efisiensi fungsional yang diperhitungkan oleh makhluk hidup.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Analisis Pengaruh Pengeluaran Perkapita, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia Tahun 2010-2019 maka peneliti mengambil kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Pengeluaran perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan yang terjadi di 7 Pulau Indonesia selama periode 2010-2019. Hal ini tentu mengindikasikan bahwa semakin besar pengeluaran perkapita maka akan signifikan menurunkan ketimpangan pendapatan yang terjadi.

2. Rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di 7 pulau besar Indonesia. Bahwa terjadi anomali ketika rata-rata lama sekolah meningkat tidak serta merta mampu menurunkan ketimpangan pendapatan.
3. Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Semakin besar penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan maka ketimpangan pendapatan akan cenderung berangsur-angsur meningkat.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang di bahas di atas, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini pengeluaran perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan yang terjadi di 7 Pulau Indonesia selama periode 2010-2019. Hal ini tentu mengindikasikan bahwa semakin besar pengeluaran perkapita maka akan signifikan menurunkan ketimpangan pendapatan yang terjadi. Untuk lebih mendorong pemerataan ekonomi pemerintah perlu mengupayakan penurunan kemiskinan dan memperluas peluang pekerjaan untuk masyarakat.
2. Pemerintah harus lebih meningkatkan kualitas tenaga pengajar di tiap kabupaten maupun tiap kecamatan dan lebih memfasilitasi setiap sekolah dari tingkat dasar sampai menengah atas agar kiranya penduduk di Indonesia bisa mengenyam bangku pendidikan.
3. Perihal kesehatan di Indonesia, hingga kini hal tersebut belum mendapatkan perhatian yang layak. Oleh karenanya pemerintah sebaiknya memberikan perhatian lebih kepada layanan kesehatan terkait penanganan kesehatan, dan diharapkan pada masyarakat untuk menjaga hidup sehat dan membiasakan aktivitas yang baik untuk kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Damanik, A. M., Zulgani, & Rosmeli. (2018). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(1), 15–25.
- Dondo, T. C., Benu, N. M., & Manginsela, E. P. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Minahasa. *Agrirud*, 1(1), 60–70.
- Hasanah, U. (2017). Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Pendapatan Per Kapita, Dan Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Kesehatan Terhadap Sektor Kesehatan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 2(1), 31–48. <https://doi.org/10.20473/jiet.v2i1.5504>
- Irwansyah, M., Ruliana, R., & Aidid, M. K. (2021). Analisis Regresi Balanced Panel dengan Komponen Galat Dua Arah pada Kasus Melek Huruf Masyarakat di Provinsi NTB. *VARLANSI: Journal of Statistics and Its Application on Teaching and Research*, 3(1), 10. <https://doi.org/10.35580/variansiunm14644>
- Muda, R., Koleangan, R., & Kalangi, J. B. (2019). Pengaruh angka harapan hidup, tingkat pendidikan dan pengeluaran perkapita terhadap pertumbuhan ekonomi di sulawesi utara pada tahun 2003-2017. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(01), 44–55.
- Nadya, A., & Syafri, S. (2019). Analisis Pengaruh Faktor Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia. *Media Ekonomi*, 27(1), 37–52. <https://doi.org/10.25105/me.v27i1.5300>
- Sanz, R., Peris, J. A., & Escámez, J. (2017). Higher education in the fight against poverty from the capabilities approach: The case of Spain. *Journal of Innovation and Knowledge*, 2(2), 53–66. <https://doi.org/10.1016/j.ijk.2017.03.002>
- Situmeang, I. F. M. (2018). *Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam Menurut Perspektif Muhammad Abdul Mannan*.